

kelompok masyarakat khusus untuk memberikan pengawasan dan pencerdasan politik kepada masyarakat lain. Hal tersebut disebabkan apabila pengawasan yang dilakukan masyarakat tanpa adanya landasan dan legitimasi dari pihak terkait maka masyarakat akan kurang berani. Dalam tulisan ini, berfokus pada penanganan ujaran kebencian. Hal tersebut sejalan dengan hambatan yang terjadi oleh Bawaslu dalam menangani ujaran kebencian adalah masyarakat merasa bahwa ia tidak mengetahui upaya yang dilakukan Bawaslu dalam menangani masalah ujaran kebencian. Hal ini dikonfirmasi oleh narasumber penulis yang berasal dari masyarakat umum, Sean Yorries dan M. Aldo.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Ujaran kebencian bisa menyebabkan terciderrainya demokrasi. Maraknya kasus ujaran kebencian, hal ini akan menyebabkan masyarakat menilai kontestasi politik dalam bias-bias yang tidak jelas, bahkan cenderung sangat buruk pandangannya. Demi mewujudkan demokrasi yang substantif, agar kualitas demokrasi terus terjaga, diperlukan upaya yang serius dari pemerintah guna mewujudkan hal tersebut. Dalam tulisan ini, penulis membahas tentang kebijakan yang dilakukan oleh Bawaslu guna memberantas ujaran kebencian dengan pisau analisis implementasi kebijakan Grindle. Dalam teori tersebut, terdapat beberapa aspek guna menjelaskan implementasi suatu kebijakan.

Terkait aspek *interest affected*, Bawaslu memiliki kiat-kiat guna mencegah terjadinya ujaran kebencian di media sosial. Adapun kiat-kiat yang dilakukan adalah melakukan berbagai sosialisasi yang menjelaskan tentang bahayanya melakukan tindakan ujaran kebencian, yang mana dengan melakukan tindakan ujaran kebencian, jejak digital tidak bisa dihilangkan. Oleh karena itu, masyarakat juga dihimbau untuk bijak dalam bersosial media. Upaya yang dilakukan Bawaslu adalah mendata website resmi dari pasangan calon saat mendaftar. Hal ini dimaksudkan agar informasi yang diterima masyarakat merupakan informasi yang valid langsung dari pasangan calon tersebut, tanpa adanya disrupsi dari pihak luar. Disamping itu, terdapat variabel lain yakni *type of benefit*. Maksud dari *type of benefit* adalah jenis keuntungan yang didapatkan dari implementasi kebijakan menentukan keberhasilan dari kebijakan itu sendiri. Kebijakan yang menekankan bahwa masyarakat tidak diperkenankan untuk melakukan ujaran kebencian. Bila pilkada dilaksanakan secara minim ujaran kebencian, ini akan menjadikan proses demokrasi berjalan dengan baik. Masyarakat pun bisa memilih pemimpin dengan pertimbangan yang lebih substantif. Berdasarkan penjelasan diatas, dalam aspek ini, Bawaslu menekankan pada upaya-upaya yang sebelumnya sudah dilakukan. Hanya saja cara itu terus dipikirkan formulasinya agar mencapai efektifitas yang diinginkan.

Dalam beberapa aspek, terdapat kendala yang hambatannya serupa, salah satunya adalah dalam aspek *extend of change envisioned*. Dalam aspek ini, yang menjadi hambatan adalah maraknya penggunaan akun-akun anonim. Pihak Bawaslu mengatakan bahwa mereka mengalami kesulitan untuk menindak kasus ujaran kebencian dengan akun yang bersifat anonim. Dalam aspek ini, dijelaskan bahwa semakin tinggi perubahan yang diinginkan, seharusnya sejalan dengan upaya yang cukup kompleks yang harus dilakukan oleh si implementor kebijakan. Upaya Bawaslu dalam menghilangkan ujaran kebencian dalam pilkada DKI Jakarta 2017 yakni Bawaslu bermitra dengan para pemangku kepentingan agar kontrol yang dilakukan oleh Bawaslu dapat lebih mudah dan lebih efisien. Dalam aspek lain, yakni aspek *site of decision making*, juga dijelaskan bahwa dalam melakukan suatu pengambilan kebijakan, harus disesuaikan juga dengan konteks kewilayahan yang berlaku. Baik secara geografis, maupun kultural. Dalam hal ini, Bawaslu dalam melakukan kebijakan guna menekan kasus ujaran kebencian dilakukan dengan pendekatan yang mutakhir. Namun sebagaimana yang penulis katakan, kendala ada pada akun yang bersifat anonim dan pada kondisi Jakarta pada saat itu yang sangat terpolarisasi menjadi dua kubu besar. Adanya polarisasi tersebut, terasa sulit bagi Bawaslu untuk membendung ujaran kebencian.

Dalam aspek *program implementors* dijelaskan bahwa dalam mengambil suatu kebijakan, harus dilakukan oleh orang atau lembaga yang memiliki legitimasi dan berkompeten untuk menjalankan kebijakan tersebut. Dalam upaya memberantas ujaran kebencian, Bawaslu merupakan lembaga yang memiliki legitimasi untuk menjalankan itu. Namun kendala yang dihadapi, Bawaslu bukanlah lembaga yang disenangi seluruh lapisan masyarakat. Dalam aspek *power, interest and strategies of power involved*, dijelaskan bahwa semakin tinggi kekuasaan si pembuat kebijakan, akan besar kemungkinan keberhasilan dari implementasinya. Bawaslu merupakan badan resmi di Indonesia yang memiliki tupoksi untuk menangani masalah pilkada, selain itu juga melakukan pencegahan. Bawaslu juga memiliki strategi untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak guna melakukan pekerjaan pengawasan seperti MUI dan lain-lain. Dalam aspek *Institution and Regime characteristics*, dijelaskan bahwa karakter dari suatu rezim akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Bawaslu mengatakan bahwa lembaganya akan terus berpihak pada pilkada yang bersih. Berdasarkan hal diatas, pihaknya akan selalu melakukan perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan untuk mewujudkan itu. Kendati ia mengatakan bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Masih terdapat hambatan-hambatan yang terjadi dalam aspek ini. Adapun hambatan tersebut adalah arakter masyarakat saat itu sudah sangat

terpolarisasi menjadi beberapa bagian yang mana masing-masing pihak memiliki rasa “ke-aku-an” yang tinggi. Oleh karena itu, kasus ujaran kebencian sulit untuk dibendung. Aspek *Compliance and responsiveness*, dijelaskan bahwa Bawaslu berperan guna memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan kebijakan terkait pencegahan dan pengawasan terkait dalam pengawasan pemilu. Dalam tulisan ini, berfokus pada penanganan ujaran kebencian. Hambatan yang terjadi oleh Bawaslu dalam menangani ujaran kebencian adalah masyarakat merasa bahwa ia tidak mengetahui upaya yang dilakukan Bawaslu dalam menangani masalah ujaran kebencian.

Secara keseluruhan, peran yang dilakukan Bawaslu dalam tugasnya untuk mengawasi jalannya Pilkada terkait dengan ujaran kebencian dirasa masih perlu mengupayakan kembali agar permasalahan-permasalahan terkait dengan ujaran kebencian dapat segera teratasi. Efektivitas fungsi pengawasan Bawaslu DKI Jakarta masih belum optimal dalam menangani ujaran kebencian di media sosial saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Hal tersebut disebabkan beberapa permasalahan terkait dengan ujaran kebencian antara lain: (1) maraknya penggunaan akun-akun anonim dalam melakukan ujaran kebencian dalam Pilkada DKI Jakarta 2017; (2) terpolarisasinya kondisi sosial dan politik saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 silam; (3) banyaknya ujaran kebencian saat pilkada DKI Jakarta. Dengan demikian, perlu adanya perbaikan di beberapa hal khususnya terkait infrastruktur atau teknologi yang dapat bermanfaat dalam melakukan pengawasan di media sosial.

5.2 Saran

Upaya yang dilakukan Bawaslu guna mencegah terjadinya ujaran kebencian sudah cukup baik, hanya saja, diperlukan upaya yang lebih efektif lagi agar ujaran kebencian bisa diatasi sedini dan seefektif mungkin. Terutama ujaran kebencian yang dilakukan dengan anonim. Rekomendasi yang penulis berikan kepada Bawaslu, yaitu: Bawaslu DKI Jakarta harus memiliki perangkat yang berbasis teknologi guna mengatasi ujaran kebencian yang bersifat anonim. Bawaslu juga perlu menggalakkan pendidikan politik agar masyarakat juga dapat dewasa dalam menggunakan hak bicarannya dan hak politiknya. Bawaslu harus memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan guna menyelesaikan permasalahan terkait dengan ujaran kebencian ini. Adapun langkah yang bisa Bawaslu ambil antara lain menjalin hubungan kemitraan dengan instansi lain seperti: Kominfo, Google, MUI, Cyber Polri, dsb, kemudian menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dari ujaran kebencian saat Pilkada DKI Jakarta dan memperkuat regulasi hukum dengan sanksi yang memberatkan pelaku dan paslon terkait dengan ujaran kebencian.